

ANALISIS KOMPARATIF BEBAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP SEBELUM DAN SESUDAH UU HPP

(Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Oleh

NUGROHO ADI PUTRO

RINGKASAN

Pemberlakuan perubahan peraturan terbaru terkait perpajakan yang diatur dalam UU HPP yang merupakan bagian reformasi perpajakan yang ada di Indonesia dan secara resmi disahkan dalam bentuk Undang-Undang pada bulan Oktober 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis komparasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT XYZ sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah UU HPP. Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap AAA dengan memiliki NPWP menghasilkan bahwa besaran PPh terutang bernilai lebih rendah saat sesudah berlakunya UU HPP. Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap MMMM dengan memiliki NPWP menghasilkan bahwa besaran PPh terutang bernilai sama saat sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap HHHH yang tidak memiliki NPWP menghasilkan bahwa besaran PPh terutang bernilai lebih rendah saat sesudah berlakunya UU HPP. Hasil perhitungan yang telah dilakukan tentunya berdampak bagi masyarakat dan sejalan dengan tujuan dalam UU HPP pada bab satu pasal satu ayat dua poin pertama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan ekonomi serta dalam bab satu pasal satu ayat dua poin ketiga yang berbunyi, yaitu mewujudkan perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.